

SRIHARJO PADA MASA KRISIS

*Pande Made Kutanegara**

Abstract

Generally, it is assumed that the economic crisis would hardly experienced by people who live in urban areas, mainly those who are in the lowest social stratum. Certainly, some people (experts) are convinced that people who live in the village would not affected by the impact of stagnating national economy. Recent studies, however, show that almost all of social stratum in Indonesia, both in cities and villages, are hit by the crisis but the intensities of its varies from one group to another. There are many factors to be considered in discussing impacts of crisis, i.e social, economy, and demography, as well. This article will clearly describe how people from various strata in the village perceive and how do they cope with the crisis.

Pengantar

Lebih dari satu tahun lamanya masyarakat kita dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, tanpa ada tanda-tanda pemulihan yang jelas. Harga berbagai kebutuhan pokok meningkat sedemikian hebat, sementara tingkat pendapatan tetap, bahkan menurun. Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Menurut BPS, selama krisis, penduduk miskin meningkat dari 22 juta orang atau 11 persen menjadi 80 juta lebih atau 40 persen, dan bahkan ada yang memperkirakan menjadi 113 juta (*Kompas*, 18 Juni 1998). Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah

angka kemiskinan diperdebatkan banyak orang, termasuk dari tiga lembaga yang berkompeten yakni SMERU, EACIQ, dan EACIF, yang memperkirakan angka kemiskinan absolut di Indonesia hanya meningkat menjadi 34 juta orang atau 17 persen. Perkiraan BPS dan lembaga-lembaga lain dengan jelas menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memberikan dampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Persoalannya adalah pada kelompok mana krisis ekonomi yang berlangsung sangat dirasakan.

* Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si. adalah staf peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Berbagai tulisan menunjukkan bahwa dampak krisis ternyata berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Walaupun ada sebagian kecil yang merasa diuntungkan oleh krisis yang terjadi, sebagian besar masyarakat merasa dirugikan oleh krisis ini. Sementara ini, diduga kelompok masyarakat yang sangat merasakan dampak krisis adalah lapisan bawah perkotaan, sementara masyarakat perdesaan relatif lebih baik. Hasil observasi singkat Jellinek di beberapa wilayah di perdesaan Jawa menunjukkan bahwa krisis tidak terjadi di perdesaan. Berbagai peluang usaha berkembang ketika krisis berlangsung dan masyarakat perdesaan justru menjadi semakin meningkat semangat kerjanya pada zaman krisis ini sehingga berbagai bantuan yang diberikan tidak begitu penting dan bermanfaat bagi mereka (*Kompas*, 10 Februari 1999).

Laporan Jellinek tersebut masih perlu dipertanyakan dan diperdebatkan, mengingat cakupan wilayah dan waktu penelitian yang dilakukan sangat pendek sehingga kemungkinan hanya mampu menangkap apa yang ada di permukaan saja. Secara metodologis, ada tiga hal pokok yang perlu dicermati dalam melihat dan menggunakan tulisan tersebut sebagai referensi. Persoalan pertama adalah persoalan representasi wilayah dan data yang dikumpulkan. Dengan menggunakan sampel wilayah yang sedemikian terbatas,

apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi pada wilayah yang berbeda dan kondisi yang berbeda? Persoalan kedua adalah masalah waktu penelitian dan metode yang digunakan. Apakah penelitian yang berjangka waktu pendek dan lebih sebagai kunjungan kerja dapat meliputi berbagai realitas yang ada. Sementara dalam kultur masyarakat kita, fakta dan realitas sosial justru ada di balik apa yang tampak (*hidden transcript*). Peneliti harus menyadari bahwa realitas masyarakat tidak sama dengan realitas yang tertangkap oleh peneliti. Jangka waktu penelitian yang sedemikian pendek jelas akan sangat menyestakan. Agar mampu menangkap realitas sosial, sangat diperlukan penelitian yang intensif. Persoalan ketiga adalah masalah fokus dan unit analisis. Dalam masa krisis, unit analisis yang paling tepat digunakan bukanlah usaha atau wilayah, melainkan rumah tangga, mengingat berbagai persoalan dan dampak krisis sangat kentara pada tingkat rumah tangga, yang akhirnya mempengaruhi manajemen rumah tangga masyarakat. Ini berarti bahwa dalam melihat dampak krisis, posisi wanita dan ibu rumah tangga menjadi sangat sentral dan strategis.

Tulisan ini menganalisis lebih dalam dampak krisis ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk di Desa Sriharjo, Yogyakarta. Desa ini terletak di ujung timur wilayah Kabupaten Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta; merupakan tipologi desa miskin di perdesaan Jawa pada tahun 1960-an. Hasil penelitian D.H. Penny dan Masri Singarimbun (1973) yang berjudul *Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmetic* telah membuka mata sebagian pengamat dan birokrasi tentang kronisnya situasi kemiskinan di perdesaan Jawa saat itu. Keterbatasan sumber daya alam yang disertai keterbatasan peluang kerja telah menciptakan masyarakat miskin di desa ini. "Situasi kemiskinan benar-benar nyata di desa ini", tulis Masri Singarimbun dalam buku tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi masyarakat desa ini ketika krisis ekonomi berlangsung di Indonesia; dan bagaimana strategi mereka dalam menyikapi berbagai perubahan yang muncul belakangan ini.

Sriharjo: Apakah Masih Desa Miskin

Dalam satu kesempatan, Prof. Dr. Mubyarto dan beberapa peneliti lain yang datang ke Desa Sriharjo terkejut ketika mengetahui desa ini tidak termasuk desa IDT. Selaku konseptor dan penanggung jawab program, dia merasa bahwa desa ini layak sebagai desa IDT karena prasarana dan sarana transportasi serta kondisi pemukiman penduduk sangat tidak mendukung. Pemukiman dan sarana yang bagus

hanya terdapat di bagian muka desa, sementara di bagian lain (di pojok desa), keadaan justru sebaliknya. Wilayah desa yang berada pada posisi 'kurang berkembang' justru lebih luas dibandingkan dengan yang dapat dianggap maju. Hal itu berkaitan dengan topografi desa yang berbeda antara wilayah desa bagian barat dengan bagian timur; yakni dataran rendah di sebelah barat dan pegunungan kapur di sebelah timur. Desa yang mempunyai luas 615,7 hektar, ternyata dua pertiganya berupa tanah kapur dan sisanya lahan pertanian yang subur. Oleh karena itu, walaupun mereka menyatakan diri sebagai petani, dilihat dari kepemilikan lahan ternyata sangat sempit yakni kurang dari 500 meter per rumah tangga. Selain sempit, lahan pertanian yang tersedia kurang subur dan selalu memiliki persoalan kecukupan air pada musim kemarau. Oleh karena itu, penduduk tidak mungkin dapat mengandalkan sektor pertanian untuk mendukung kehidupannya. Mereka harus mencari alternatif lain di luar sektor pertanian untuk menopang kehidupannya.

Sejalan dengan perbaikan sarana transportasi, pekerjaan *non-farm* dan *off-farm* berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir (Singarimbun, 1993). Hampir tiap menit terdapat bus angkutan yang lewat di jalan propinsi yang membelah bagian barat Desa Sriharjo. Setiap pagi jalan yang

beraspal mulus itu dipadati dengan anak-anak sekolah dan penduduk yang melakukan *commuting* ke Yogya dengan naik sepeda. Pekerjaan sebagai buruh bangunan atau buruh serabutan di kota, atau yang dikenal dengan istilah *glidhik*, memiliki peran penting dalam struktur perekonomian penduduk Sriharjo. Sementara itu, terjadi juga arus mobilitas penduduk ke luar wilayah. Terdapat dua pola dalam mobilitas penduduk Sriharjo. Pertama, mobilitas ke kota-kota besar yang letaknya relatif jauh, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, dan Surabaya. Pola ini biasanya dilakukan oleh para penduduk berusia muda, berpendidikan menengah ke atas (biasanya lulusan SMA), dan bekerja pada sektor industri. Mereka biasanya pulang setengah tahun atau satu tahun sekali. Kedua, mobilitas ulang-alik ke Yogyakarta. Pelaku mobilitas ini biasanya orang-orang yang sudah berumur, pendidikan rendah, dan bekerja di sektor informal atau buruh bangunan. Pekerjaan *glidhik* inilah yang banyak memberikan sumbangan dalam pendapatan rumah tangga di Sriharjo. Dalam satu hari kerja mereka biasa dibayar Rp6.000,00 sampai dengan Rp9.000,00 sesuai dengan keahliannya.

Suasana desa yang agraris ini juga lebih diperkaya dengan munculnya industri kecil berupa pembuatan krupuk dan pembuatan kayu arang. Pembuatan kayu arang

merupakan jenis industri yang sudah cukup tua di desa ini. Sejak zaman Belanda, desa ini terkenal sebagai pemasok kayu arang untuk daerah sekitarnya. Hutan yang masih cukup luas dan lebat merupakan potensi besar yang dapat mereka manfaatkan pada masa lalu. Ketika hutan telah habis dijarah (wilayah sekitar desa ini pada masa lalu cukup terkenal sebagai sarang pencuri kayu jati dan pengambil ranting tanaman hutan) maka industri kayu arang mulai kesulitan bahan baku. Usia industri kayu arang sebenarnya sebanding dengan usia pembuatan gula kelapa di desa ini. Pembuatan kayu arang berkembang pada wilayah-wilayah yang dekat dengan hutan (daerah perbukitan di bagian timur desa), sedangkan industri gula kelapa berkembang di daerah dataran rendah di bagian barat desa. Menurunnya jumlah industri pembuatan kayu arang ternyata diikuti pula dengan menurunnya jumlah industri gula kelapa. Hidup modern yang sering diartikan dengan hidup bersih dan sehat telah mengakibatkan terjadinya pembabatan terhadap berbagai tanaman pekarangan, termasuk pohon kelapa. Meningkatnya pembangunan rumah dan masuknya jaringan listrik juga telah mengorbankan banyak tanaman kelapa yang ada di desa ini. Mengingat pohon kelapa merupakan bahan baku utama industri gula kelapa, maka dengan demikian

terjadi pergeseran status pekerjaan menderes ke jenis pekerjaan lain.

Hilangnya berbagai industri tradisional, selain diikuti dengan munculnya kesempatan kerja di kota, akhir-akhir ini di desa ini juga berkembang industri kecil pembuatan tas bordir dan pembuatan pakaian tradisional yang melibatkan tenaga ibu-ibu atau remaja putri dengan sistem *putting out system*. Upah per hari yang diterima berkisar antara Rp3.000,00 – Rp4.000,00. Peluang kerja ini sangat besar artinya bagi rumah tangga pedesaan. Selain mereka mendapatkan uang, salah satu kebiasaan buruk yakni mencari kutu kepala yang dilakukan ibu-ibu di desa setelah selesai memasak, juga menjadi hilang sama sekali.

Sriharjo dalam Masa Krisis

a. Persepsi Lokal tentang Krisis

Istilah krisis merupakan sebuah wacana baru yang mulai memasuki wilayah-wilayah publik maupun pribadi dari setiap penduduk Indonesia. Oleh karena itu, krisis sangat mungkin diberi dan memperoleh makna berbeda dari setiap orang ataupun kelompok. Sebagai istilah baru, krisis sangat cepat populer dalam masyarakat pedesaan. Istilah krisis dikenal sebagai krismon, moneter, dan zaman krisis. Walaupun kata krisis merupakan istilah baru bagi mereka, fenomena krisis sebenarnya telah mereka alami sepanjang kehidupannya

(Kutanegara, 1998c). Kesulitan ekonomi sebagai bagian dari *simptom* krisis sebenarnya selalu mereka alami sepanjang hidupnya, namun selama ini mereka menyatakan dengan istilah yang berbeda, misalnya "*wong ora nduwe; urip rekasa*", dsb). Dalam masa krisis sekarang ini, mereka melihat *simptom* krisis yang lebih kompleks, misalnya kembalinya penduduk desa yang bekerja di kota, banyaknya buruh bangunan yang tidak pergi ke kota, dan naiknya harga-harga kebutuhan hidup mereka.

Persepsi dan konsepsi tentang krisis juga sangat beragam di desa ini. Tidak semua penduduk menganggap zaman sekarang ini adalah zaman krisis. Variasi pandangan dan persepsi tentang krisis dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomis dan demografis seperti umur, status ekonomi, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Dilihat dari segi umur, tampak hanya generasi muda (*young generation*) yang menganggap bahwa situasi sekarang ini adalah krisis. Sebaliknya, generasi tua (*old generation*) menganggap bahwa sekarang ini masih zaman normal yang tidak perlu diberi perhatian khusus. Perbedaan konsepsi tentang krisis tampak dipengaruhi oleh riwayat kehidupan mereka. Bagi kelompok tua, krisis disamakan dengan kelaparan. Jika terjadi *larang pangan* yang berakibat pada munculnya kelaparan, itu adalah

zaman krisis; kalau masih ada bahan makanan, bukanlah krisis. Konsepsi generasi tua seperti itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka yang sudah berkali-kali mengalami tekanan ekonomi yang sangat parah, bahkan kelaparan hebat. Paling tidak, ada empat periode kelaparan /*larang pangan* yang pernah mereka alami, yakni (1) zaman melaise (meleset) tahun tiga puluhan; (2) zaman penjajahan Jepang 1942–1945, saat tentara Jepang merampas apa saja yang dimiliki oleh penduduk seperti beras, ketela, dan ternak; (3) zaman Revolusi 1945–1950, saat mereka sibuk mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak sempat memikirkan pertanian; dan (4) zaman Orla (Orde Lama 1960–1970) saat mereka terpaksa makan pakan kuda (beras bulgur), beras tekad (tela-kacang-daging), bonggol pisang, dan umbi-umbian beracun yang diolah sedemikian rupa sehingga racunnya hilang dan bisa dimakan (Mubyarto, 1999).

Generasi muda yang lahir dan besar pada zaman Orde Baru, kehidupan enak dan manja telah mereka peroleh selama ini. Oleh karena itu, sedikit goncangan yang mereka hadapi sudah menjadikan dirinya menjerit dan merasa susah. Oleh karena itu, zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman krisis. Bagi mereka, krisis tidak hanya berarti kelaparan (kurang makan), tetapi setiap situasi perubahan (penurunan) akses

terhadap kebutuhan mereka. Krisis bagi mereka telah tampak dalam turunnya upah, turunnya nilai tukar uang (pendapatannya), dan berubahnya kuantitas dan kualitas konsumsi hariannya. Naiknya harga rokok berlipat-lipat mengakibatkan mereka harus menurunkan kualitas rokok yang dikonsumsi. Demikian juga, naiknya harga lauk-pauk memaksa mereka mengonsumsi lauk seadanya (nasi dengan sayur bening) dan sambel. Semuanya itu merupakan *symptom-symptom* krisis yang telah ada di sekeliling mereka. Oleh karena itu, generasi muda cenderung menganggap bahwa sekarang ini adalah krisis yang sudah cukup parah (Kutanegara, 1998b)

Persepsi tentang krisis juga berbeda pada mereka yang bekerja di sektor pertanian dan non-pertanian. Mereka yang bekerja di sektor pertanian, walaupun juga menganggap bahwa saat ini adalah zaman krisis, keluhan mereka tidak sehebat penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian (buruh bangunan, tukang becak, penjual bakso, dsb). Untuk sektor pertanian, walaupun harga alat dan obat-obatan di sektor pertanian meningkat, harga komoditi pertanian juga meningkat sehingga mereka belum begitu merasakannya sebagai krisis. Sebaliknya, bagi mereka yang bekerja di sektor nonpertanian, jatuhnya perekonomian sekarang ini justru berakibat sangat buruk bagi kehidupan mereka.

Sebagian dari buruh bangunan tidak memperoleh pekerjaan, walaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Mereka inilah merupakan kelompok yang paling parah terkena krisis saat ini. Mereka mengatakan bahwa saat sekarang ini adalah “zaman susah, zaman *angel*”. Dalam setiap kesempatan mereka selalu menggunakan kata krismon sebagai legitimasi perilaku atau kondisi mereka. Misalnya, ketika datang bertamu ke rumahnya dan tidak ada suguhan teh manis (seperti umumnya), mereka menyatakan “maaf Mas, sekarang lagi krismon, tidak ada suguhan”, kata mereka).

Walaupun kelompok tua menyatakan saat ini belum krisis, perlu ditegaskan bahwa standar yang mereka gunakan sangat rendah, yakni cukup makan sangat sederhana dan cenderung tidak memperhitungkan nilai gizi; “*Pokoke sing penting mangan, ora usah aeng-aeng*”, kata mereka. Sementara, kelompok muda menganggap bahwa banyak kesulitan ekonomi sekarang ini muncul. “Harga berbagai kebutuhan naik sedemikian pesat sehingga zaman susah datang lagi”, kata mereka. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah orang tua (Jawa) umumnya tidak mau terbuka mengemukakan pendapat atau pandangannya. Dengan pandangan hidup prihatin dan seadanya maka kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan makan pun tidak

menjadi persoalan besar bagi mereka. Selain itu, pengalaman hidup dan perbandingan dengan masa lalunya telah menciptakan pandangan bahwa zaman sekarang ini hidup jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu.

b. Dampak Krisis terhadap Masyarakat Perdesaan

Gejolak ekonomi (dalam tingkat makro) yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997–1998 berpengaruh besar dalam perekonomian desa. Kenaikan harga barang-barang konsumsi harian, terutama beras, sayur-sayuran, sabun, minyak goreng, rokok, gula, teh, dan sebagainya sangat dirasakan oleh mereka. Oleh karena itu, dalam konsumsi harian, mereka mencoba menurunkan kualitas konsumsi dengan tidak mengonsumsi daging dan ikan. Bahkan, tahu dan tempe yang mengalami kenaikan harga hampir 5 kali lipat, untuk sebagian orang sudah merupakan konsumsi mewah di desa ini. Minuman manis yang biasanya mereka konsumsi sebelum berangkat kerja sekarang terpaksa digantikan dengan air putih. Demikian juga konsumsi rokok (terutama bagi laki-laki), kini mereka mulai mengganti jenis rokok yang dikonsumsi dengan jenis yang lebih murah. Berbagai jenis rokok baru seperti Inter Biru, Jeruk, Pompa tampak beredar luas dalam komunitas ini.

Kemacetan proyek-proyek konstruksi di Yogya karena melambungnya harga bahan bangunan secara langsung juga mengurangi pendapatan rumah tangga penduduk Sriharjo. Kalau sebelum krisis mereka masih mampu mendapatkan sejumlah uang per minggu, kini hal tersebut tidak terjadi lagi. Para penglaju yang kehilangan pekerjaan tersebut kini kebanyakan hanya bekerja apa adanya di rumah untuk mengisi waktu menunggu dilanjutkannya lagi proyek-proyek bangunan. Akibatnya, jalan Sriharjo-Yogyakarta yang biasanya ramai dengan para penglaju kini menjadi agak sepi.

Dampak krisis kegiatan masyarakat Sriharjo sangat bervariasi. Permintaan terhadap krupuk yang meningkat pesat selama krisis merupakan pemacu berkembangnya usaha pembuatan krupuk di desa ini. Pembuatan gula kelapa dan kayu arang relatif stabil sehingga walaupun harganya meningkat, penghasilan mereka relatif tetap. Salah satu kegiatan yang dianggap sebagai penyelamat perekonomian rumah tangga adalah pembuatan tas dari benang (bordir) dan pembuatan pakaian tradisional. Kedua kegiatan ini pada masa krisis justru menjadi tumpuan harapan bagi rumah tangga yang suaminya kesulitan memperoleh pekerjaan. Dengan penghasilan berkisar Rp4.000,00 – Rp5.000,00 per hari, kegiatan ini

telah mampu menopang kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam masa krisis justru peran warung menjadi sangat sentral dan penting. Warung merupakan institusi penyelamat yang sangat penting nilainya bagi mereka yang mengalami kesusahan atau persoalan. Bagi penduduk pedesaan, warung seringkali menjadi penyambung 'nyawa' dalam kehidupan sekelompok dan seorang individu. Warung merupakan tempat yang paling enak dan mudah untuk berhutang barang kebutuhan harian. Warung juga menjadi tempat meminjam uang secara mendadak yang bersifat *sebrakan*. Meskipun demikian, selama krisis omzet penjualan warung ternyata malah menurun drastis. Penduduk pedesaan tampaknya berusaha meminimalkan pengeluaran mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka anggap tidak terlampau penting mereka tinggalkan, sedangkan kebutuhan utama juga diturunkan kualitasnya. Dengan cara itu mereka berusaha menurunkan pengeluaran ketika krisis berlangsung. *Wedang legi* yang terdiri dari teh, kopi, dan susu berangsur-angsur dihilangkan, digantikan dengan air putih. Sebagian di antara mereka menyatakan *wedang legi* hanya ada di tempat *ewuh* atau di tempat orang punya kerja. Saat ini, salah satu tujuan untuk datang ke tempat upacara adalah agar dapat minum teh atau kopi manis. Ada rasa rindu

bagi sebagian di antara mereka minum manis di tempat upacara.

Dalam masa krisis, sektor pertanian di desa ini mengalami tekanan dari dua hal, yakni tekanan akibat naiknya harga-harga *input* pertanian (pupuk dan obat-obatan); dan yang kedua tekanan dari musim yang tidak menentu (peralihan dari *el nina* ke *la nina*). Tekanan dari *input* pertanian tampak dari meningkatnya harga pupuk dan langka serta sulitnya memperoleh pupuk yang mereka perlukan. Pupuk urea meningkat harganya dari Rp250,00 menjadi Rp400,00 dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp600,00 per kilogram. Pupuk Kcl juga meningkat dari Rp750,00 menjadi Rp3.000,00 per kilogram. Obat-obatan lain seperti furadan dan pembasmi hama lainnya juga meningkat dua sampai lima kali lipat. Di sisi lain, mereka juga mengalami tekanan akibat *el nina*, yang berakibat pada terjadinya kemarau panjang. Posisi wilayah yang memang berada di hulu menjadikan air irigasi tidak pernah sampai ke wilayah pertanian di desa ini pada saat kemarau panjang (1997). Percekocokan memperebutkan air yang debitnya memang sangat kecil kerap terjadi sehingga menjadikan suasana sangat gerah di desa. Setiap malam, petani yang memperoleh jatah air menjaga saluran air yang ada. Sebaliknya pada musim hujan, air yang datang juga sangat melimpah sehingga menggenangi tanaman

mereka. Kegagalan demi kegagalan di sektor pertanian beriringan di desa ini. Pada musim kemarau, mereka gagal menanam padi dan pada musim hujan, mereka gagal memanen kedelai.

Tekanan yang datang bertubi-tubi semacam itu menjadikan sektor pertanian tidak memberikan sumbangan maksimal pada masa krisis. Walaupun sebagian di antara mereka panen (baik padi maupun palawija), hasilnya tidak maksimal. Untungnya pada saat krisis, harga komoditi pertanian mengalami peningkatan yang sedemikian besar sehingga mampu memberikan sedikit tambahan pendapatan bagi mereka. Beras yang semula berharga Rp800,00 meningkat menjadi Rp2.500,00 per kilogram. Demikian juga ketela pohon (gaplek) mengalami peningkatan dari Rp200,00 menjadi Rp800,00. Jagung dan tembakau juga mengalami peningkatan cukup tinggi. Meskipun demikian, karena pemilikan lahan yang sedemikian terbatas, hasil panen yang berupa padi cenderung mereka simpan sebagai cadangan konsumsi rumah tangga, sedangkan hasil panen palawija mereka jual. Selain itu, hasil-hasil dari tanaman pekarangan juga meningkat harganya. Pisang raja yang semula harganya Rp7.000,00 naik menjadi Rp20.000,00 per tandan, pisang kepok yang semula Rp3.000,00 naik menjadi Rp15.000,00 per tandan. Demikian juga halnya buah kelapa naik dari

Rp300,00 menjadi Rp1.500,00 atau Rp2.000,00 per butir.

Pada masa krisis peningkatan harga berbagai komoditi pertanian ternyata tidak sebanding dengan peningkatan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Harga produksi pertanian memang meningkat, namun peningkatan harga tersebut ternyata kalah jauh dibandingkan dengan peningkatan harga pupuk dan obat-obatan. Selain itu, harga berbagai kebutuhan rumah tangga meningkat pesat, bahkan tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan mereka. Dalam situasi semacam ini, tidak ada penduduk yang diuntungkan. Bagi mereka yang bergerak hanya di sektor pertanian, pemilikan lahan yang sempit merupakan salah satu kendala; sementara bagi mereka yang bekerja di luar sektor pertanian, hilangnya pekerjaan dan rendahnya tingkat upah telah mengakibatkan perekonomian rumah tangga menjadi terpuruk.

Krisis Ekonomi dan Kemiskinan di Perdesaan

Berbagai tekanan yang muncul selama krisis telah mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan. Turunnya tingkat kesejahteraan itu dengan mudah dapat diamati dalam rumah tangga perdesaan. Kesulitan ekonomi semakin terasa dan keluhan tentang sulitnya pemenuhan berbagai kebutuhan rumah tangga

merupakan pembicaraan rutin ibu-ibu rumah tangga setiap hari. "*Kabeh saiki cupet*", kata mereka. Gejala lain juga dapat diamati dari meningkatnya utang-piutang di desa. Warung sebagai tempat berhutang yang paling dekat dan mudah menjadi tumpuan bagi masyarakat perdesaan.

Dilihat dari pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dengan jelas tampak bahwa pengeluaran menjadi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Dalam tulisan ini sebagai ilustrasi tingkat kesejahteraan penduduk perdesaan, digunakan data yang dikumpulkan pada tahun 1998 (data terbaru sedang diolah). Batas kemiskinan yang digunakan adalah perhitungan Sajogyo yang menggunakan konsep tingkat pengeluaran ekuivalen beras. Pada awalnya, garis kemiskinan ini adalah 240 kg beras per orang per tahun untuk pedesaan. Perkembangan selanjutnya adalah ketentuan garis kemiskinan berubah menjadi lebih rinci. Pengeluaran rumah tangga per bulan dipakai sebagai proksi terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan diperoleh dengan membagi pengeluaran rumah tangga dengan harga beras yang berlaku saat penelitian. Ukuran garis kemiskinan dengan ekuivalen beras memang telah disadari memiliki banyak kelemahan, namun dalam situasi yang sangat tidak stabil seperti saat ini,

ukuran ini dianggap masih cukup memadai. Selain itu, kenyataan di lapangan memang menunjukkan bahwa masyarakat setempat selalu menggunakan patokan beras sebagai ukuran dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan, juga dalam mengukur tingkat pendapatan dan kesejahteraan mereka.* Pada saat penelitian harga beras berkisar antara Rp1.500,00 – Rp2.000,00 per kilogram.

Dengan menggunakan tiga periode pengumpulan data (1972, 1989, dan 1998) tampak bahwa sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan dari 84 persen pada tahun 1972 menjadi 31 persen pada tahun 1989 dan kemudian naik menjadi 33 persen pada tahun 1998. Sementara itu, sumbangan sektor nonpertanian

meningkat dari 16 persen pada tahun 1972 menjadi 69 persen pada tahun 1989 dan turun sedikit menjadi 67 persen pada tahun 1998. Ini menunjukkan bahwa sektor nonpertanian semakin dominan perannya di desa tersebut. Sementara itu, dilihat dari pendapatan rumah tangga, krisis mengakibatkan turunnya pendapatan dari 296 kg beras pada tahun 1972 menjadi 406 kg beras pada tahun 1989 dan kembali turun menjadi 286 kg beras pada tahun 1998. Turunnya pendapatan pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk sangat miskin dari 44,3 persen pada tahun 1972 menjadi 28,3 persen pada tahun 1989 dan selama krisis meningkat menjadi 50,6 persen. Jumlah penduduk miskin semakin berkurang dari 69,5

* Walaupun penggunaan beras (*equivalent* beras) sebagai patokan dalam penentuan garis kemiskinan banyak diperdebatkan karena mengandung beberapa kelemahan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat justru menggunakan ukuran ini untuk menilai pendapatan dan pemberian sumbangan pada orang lain. Ketika krisis berlangsung, masyarakat (terutama pekerja nonpertanian) mengalkulasi pendapatannya dengan fluktuasi harga beras. Sebagai contoh, seorang buruh bangunan yang mempunyai pendapatan Rp 8.000,00 per hari, sebelum krisis nilainya sama dengan 10 kg beras. Ketika krisis dengan tingkat pendapatan yang sama (upah buruh selama krisis tidak mengalami kenaikan) nilainya hanya 3 kg beras. Ini berarti bahwa pendapatan mereka turun sepertiganya. Dalam aktivitas sumbang-menyumbang, masyarakat juga selalu menilai besarnya sumbangan dengan harga beras yang berlaku. Sebelum krisis, umumnya masyarakat menyumbang 10 kg beras (atau setara dengan itu) yang harganya sekitar Rp 5.000,00 – Rp 7.000,00. Selama krisis dengan harga beras Rp 2.500,00 – Rp 3.000,00 mereka mengalami kesulitan kalau tetap menyumbang setara 10 kg beras. Sebagai gantinya mereka menyumbang sekitar Rp 10.000,00 – Rp. 15.000,00. Jumlah itu, menurut mereka hanya setara sekitar 3-5 kg beras, yang kalau dibandingkan dengan masa sebelum krisis, besarnya sumbangan justru menurun drastis. Berdasarkan hal itu, sangat jelas bahwa ukuran ekuivalen beras tidak semata-mata ukuran etik, tetapi juga ukuran emik.

persen pada tahun 1972 menjadi 41,5 persen pada tahun 1989 dan menurun lagi menjadi 16,9 persen pada tahun 1998. Data ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok penduduk miskin dan hampir miskin merupakan kelompok yang selalu mengalami dampak yang parah kalau terjadi ketidakstabilan ekonomi. Mereka sangat rentan terhadap perubahan di luar kehidupannya. Jika dicermati lebih jauh, jumlah penduduk sangat miskin selama krisis justru lebih tinggi dibandingkan dengan pada awal Orde Baru.

Apabila angka tersebut dirinci lebih jauh, tampak bahwa pendu-

duk sangat miskin saat ini jumlahnya sangat tinggi yakni 78,1 persen, sementara yang hampir miskin dan tidak miskin hanya 12 persen. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya harga berbagai kebutuhan rumah tangga (terutama beras) belakangan ini telah menambah kemiskinan dalam jumlah yang sangat besar di perdesaan. Fakta ini sesuai dengan tingkat kesulitan yang paling dirasakan oleh penduduk Sriharjo saat ini adalah memperoleh pendapatan (26,4 persen), memenuhi kebutuhan harian (39,1 persen), dan memenuhi pelayanan kesehatan (12,7 persen), sedangkan sisanya

Tabel 1
Pendapatan Rumah Tangga Setara Beras di Dusun Miri (Sriharjo)

Sumber Pendapatan	1972	1989	1998
Sawah	578	254	-
Pekarangan	749	224	-
Ternak Ayam	62	101	-
Total Pertanian	1389 (84 %)	679 (31 %)	312 (33 %)
Bukan/luar pertanian	266 (16 %)	1508 (69 %)	622 (67 %)
Total Pendapatan	1655	2187	1061
Pendapatan per kapita	296	406	286
Persentase sangat miskin setara 240 kg beras/tahun	44,3	28,3	50,6
Persentase miskin setara 320 kg beras/tahun	69,5	41,5	16,9

Sumber : Data Primer , 1998

menganggap bahwa kesulitan hidup sekarang adalah memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan, biaya sosial, dan rumah.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Orde Baru telah mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup penduduk pedesaan. Hal itu tampak dari jenis-jenis rumah yang ada di pedesaan, yang sebagian di antaranya berupa bangunan permanen (tembok bata, lantai semen, bahkan keramik), dan kepemilikan alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, serta alat komunikasi lainnya. Namun, harus diingat bahwa barang-barang semacam itu merupakan 'barang akumulasi' yang dimiliki setelah melakukan proses *saving* yang panjang. Ketika krisis terjadi dampak yang sangat kelihatan adalah hilang dan turunnya tingkat

pendapatan, bukan pada kebutuhan sekunder. Namun, diduga kalau krisis berlangsung terus, kemampuan mereka untuk menjaga berbagai warisan (rumah dan fasilitas lainnya) juga akan menurun drastis sehingga dalam jangka waktu lama barulah kita akan menemui suasana desa yang kelihatan muram seperti pada awal Orde Baru.

Analisis lain yang bisa dikembangkan berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin adalah gaya hidup penduduk miskin yang cenderung irit (mereka mengenal konsep *irit*, *gemi*, dan *ngati-ati*) dalam mengelola pendapatan. Mereka mencoba membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok (terutama makan), sisanya ditabung dalam berbagai bentuk (rumah, kendaraan, dan ternak). Walaupun peningkatan pendapatan selama

Tabel 2
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Desa Sriharjo menurut Batasan Sajogyo

Tingkat Kemiskinan	Batas Miskin (pengel.kg/kapita/bln)	Jumlah	Persentase
Sangat Miskin	< 20 kg	278	78,1
Miskin	20-26 kg	36	10,1
Hampir Miskin	26-40 kg	33	9,3
Tidak Miskin	> 40 kg	9	2,5
Jumlah		356	100

Sumber: Data Primer, 1998

Orde Baru tidak begitu tinggi, dengan gaya hidup yang sederhana, mereka dapat menggunakannya untuk berbagai hal. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat pesat selama krisis, maka sebagian besar pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (terutama makan). Dalam zaman normal, tingkat pendapatan yang sebenarnya kecil mampu disisihkan sebagian dalam bentuk tabungan seperti ternak, rumah, alat transportasi; namun dalam masa krisis, tingkat pendapatan, yang juga kecil, terpaksa mereka habiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan harian.

Respon Rumah Tangga terhadap Krisis

Bagi rumah tangga pedesaan, yang sangat dirasakan pada saat krisis adalah melambungannya harga-harga kebutuhan pokok. Pada saat yang sama mereka juga merasakan turunnya daya beli mereka. Walaupun dampak tersebut merata pada semua kelompok, dampak yang sangat hebat terasa pada kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki atau tidak mengusahakan lahan pertanian. Umumnya mereka adalah pekerja (buruh) bangunan, yang mengandalkan pendapatannya semata-mata dari penghasilan nonpertanian. Buruh tani dan buruh bangunan yang semula memperoleh pendapatan setara 7–10 kilogram beras, pada saat krisis

menurun menjadi setara 2–3 kilogram beras. Walaupun tingkat pendapatan mereka tetap, harga barang kebutuhan pokok (terutama beras) mengalami peningkatan sangat pesat sehingga sebagian besar dari penghasilannya habis untuk membeli barang kebutuhan pokok. Selain penurunan nilai pendapatan, ancaman kehilangan pekerjaan juga sangat besar. Di antara mereka menghadapi kehidupan ini tanpa kepastian, kadangkala berangkat kerja dan kala yang lain mereka menganggur karena pekerjaan tidak ada. Kondisi ini jelas berpengaruh langsung terhadap tingkat dan kontinuitas pendapatannya.

Dalam kondisi semacam itu maka setiap rumah tangga berusaha menciptakan berbagai strategi agar tetap *survive*. Berbagai respons dikembangkan oleh setiap rumah tangga pedesaan. Salah satu di antaranya adalah dengan minimalisasi pengeluaran rumah tangga. Mereka melakukan penghematan pengeluaran terhadap hampir semua kebutuhan mereka. Mereka hanya mengonsentrasikan pada kebutuhan konsumsi sebagai kebutuhan utama. Salah seorang di antara mereka menyatakan *sing penting iso mangan, mangan ya sak anane, ora usah neka-neka apa maneh enak-enakan* (yang penting bisa makan, makan ya seadanya, tidak usah macam-macam, apalagi makan yang enak-enak). Sebagian rumah tangga miskin mulai

mengonsumsi makanan yang terbuat dari ketela (gapplek/tiwul) dan jagung. Harga beras yang naiknya luar biasa mereka coba siasati dengan mencari alternatif lain. Secara perlahan-lahan mereka mencoba memperkenalkan jenis makanan *nenek moyang* (istilah mereka) kepada generasi muda. Anak-anak muda cenderung tidak mau makan apabila disuguh dengan makanan tersebut. Untuk itu, mereka mencoba mengonsumsi tiwul secara bergantian. Kadangkala pagi hari mereka makan tiwul dan jagung, kemudian pada siang hari dan malam hari makan nasi. Pola lain adalah dengan mencampur nasi dan tiwul pada saat yang sama. Pada siang hari mereka makan tiwul bercampur dengan nasi. Pengeluaran terhadap lauk-pauk juga ditekan serendah-rendahnya. Mereka berusaha mengurangi pengeluaran untuk lauk-pauk yang harus mereka beli. Bagi kelompok miskin, tempe dan tahu sudah merupakan barang mewah. Mereka lebih banyak makan dengan sayur pedas dan sayur bening.

Pengurangan pengeluaran untuk konsumsi diikuti pula dengan penghilangan pengeluaran yang lain. Kopi dan teh (minuman manis) mulai hilang dari rumah tangga pedesaan. Demikian juga halnya dengan kebiasaan mengonsumsi makanan kecil di sela-sela jam makan mulai hilang. Walaupun masih, jenis barang yang dikonsumsi

si beralih ke barang-barang konsumsi produk lokal seperti ketela rebus, kacang rebus, dan berbagai jenis makanan kecil olahan dari ketela pohon.

Salah satu aktivitas dan pengeluaran yang tidak bisa mereka tekan adalah pengeluaran untuk "umum". Konsep umum di sini mengacu pada pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, terutama kegiatan sumbangmenyumbang bila ada yang punya hajatan seperti kematian, pernikahan, dan supitan. Mereka memiliki patokan besarnya sumbangan sebanding dengan harga 10 kg beras. Sebelum krisis, sumbangan berkisar antara Rp5.000,00 sampai Rp8.000,00. Namun, setelah krisis, itu berarti berkisar antara Rp20.000,00 sampai Rp25.000,00. Oleh karena itu, mereka menurunkan sumbangan menjadi Rp15.000,00 sampai Rp20.000,00. "Terpaksa *merem* dulu", kata mereka, yang berarti dengan sedikit rasa malu memberikan sumbangan sebesar itu.

Dalam masa krisis justru upaya untuk memperoleh pendapatan semakin meningkat di pedesaan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari berbagai peluang yang ada, baik di desa maupun di kota. Buruh-buruh bangunan yang tidak memperoleh pekerjaan di kota berusaha mendapatkan pekerjaan di pedesaan. "*Pokoke sing penting mubeng*",

kata mereka. Solidaritas di antara tetangga dan keluarga luas tetap terjalin, namun hubungan semacam itu tetap dilandasi oleh perhitungan untung rugi. Dalam masa krisis tampaknya tidak ada respons kelompok untuk mengatasi krisis. Respons lebih banyak muncul secara individual.

Respons Birokrasi terhadap Krisis

Pada masa krisis, hampir semua departemen berusaha menciptakan dan menggulirkan berbagai program penanggulangan krisis, yang tergabung dalam program jaring pengaman sosial (JPS). Departemen Sosial menggulirkan program bantuan sosial berupa sembako, anak asuh, beasiswa, dan santunan lansia. Departemen Kesehatan menyelenggarakan program Jaringan Perlindungan Kesehatan dengan sistem Kartu Sehat, yang bertujuan untuk memberikan pengobatan gratis bagi rumah tangga miskin, ibu hamil, dan anak balita miskin. Departemen Tenaga Kerja mengembangkan program padat karya. Demikian juga beberapa departemen lain berusaha mengembangkan program penanggulangan dampak krisis melalui berbagai cara.

Namun sayangnya, berbagai bantuan yang mengalir ke desa tampaknya tidak memancing respons dari perangkat kelurahan.

Petugas kelurahan hanya berperan sebagai penyalur bantuan dan tidak ada inisiatif untuk mengembangkan berbagai program. Di sini tampak bahwa institusi birokrasi tingkat desa yang selama Orde Baru hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat masih terjadi. Inisiatif tentang penanggulangan krisis tampaknya tidak muncul pada kelompok ini. Demikian juga pada tingkat komunal, berbagai bantuan yang datang ke desa lebih banyak disikapi sebagai santunan (*charity*) dan bukan sebagai wahana pengembangan ekonomi produktif yang sebenarnya merupakan inti dari program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Masyarakat yang terkena krisis dengan susah payah mengembangkan berbagai strategi dan jaringan sosial ekonomi untuk menanggulangi krisis yang mereka hadapi. Sementara, berbagai bantuan yang datang lebih banyak menyentuh tingkat permukaan masyarakat.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia ternyata juga melanda masyarakat perdesaan. Hanya memang, tingkat keparahannya sangat bervariasi antar golongan dan kelas sosial. Untuk kelas sosial ekonomi atas, krisis hanya mengurangi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder. Namun, bagi masyarakat

lapisan bawah, krisis ternyata telah menyentuh kebutuhan primer mereka. Makanan mereka sebelum krisis yang memang sudah sederhana, selama krisis menjadi lebih sederhana lagi. Pengurangan secara kuantitas dan kualitas mereka lakukan terhadap konsumsi harian mereka. "Yang penting makan dan *wareg*", selalu mereka ucapkan dalam setiap kesempatan. Oleh karena itu, tidaklah beralasan kalau Jellinek mengatakan bahwa krisis tidak melanda masyarakat perdesaan. Tingkat kesejahteraan masyarakat selama krisis menurun drastis. Hilang dan turunnya pendapatan mereka tidak sebanding dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok (pengeluaran) mereka.

Dalam masa krisis, ternyata respons kelompok dan birokrasi tidak tampak muncul di perdesaan. Respons yang berkembang lebih banyak merupakan respons individual dan rumah tangga. Berbagai kesulitan individu dan rumah tangga harus diselesaikan sendiri. Kreativitas dan aktivitas individual untuk menanggulangi krisis justru semakin meningkat. Respons kelompok hanya muncul pada saat kondisi sudah sedemikian parah dan bila telah terjadi

bencana. Demikian juga, birokrasi lokal tampak tidak memberikan perhatian serius dalam menyikapi dampak krisis yang berkembang di perdesaan. Mereka sudah terlampaui sibuk dengan berbagai kegiatan rutin administrasi desa dan sebagai pelayan aparat birokrasi yang lebih tinggi. Dalam hal ini tampak bahwa birokrasi desa lebih berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan belum sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat desa.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan pada tiga penelitian lapangan yaitu penelitian Social Security, penelitian Dampak Krisis di Perdesaan dan penelitian untuk disertasi penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada sebagai pengelola dua penelitian tersebut di atas. Di samping itu, juga terima kasih kepada Prof. Dr. Ida Bagoes Mantra, Dra. Sukamtiningsih, Sri Purwatiningsih, S.Si., Gutomo Bayu Aji, S.Sos, dan Agus Indiyanto, S.Sos. sebagai anggota tim penelitian.

Referensi

- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan desa mulai dari belakang*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Dewanta, Awan Setya, et al. 1995. *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kutanegara, Pande Made. 1998a. "Dampak krisis bagi rumah tangga pedesaan: studi kasus desa Sriharjo, Yogyakarta". Bandung: AKATIGA Bandung-CASA Amsterdam. Paper dipresentasikan pada *Seminar Dampak Krisis Bagi Kaum Buruh*.
- . 1998b. "Kemiskinan, bantuan dan konflik sosial: studi kasus desa Sriharjo, Yogyakarta". Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. *Bahan Diskusi Mingguan Social Security and Social Policy Project*.
- . 1999. "Economic crisis and the dynamic of poverty: life changes in Sriharjo, Central Java". Nijmegen, The Netherland: KUN Nijmegen, Casa Amsterdam dan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. Paper dipresentasikan dalam *Seminar Crisis and Social Security in Indonesia*.
- Mubyarto. 1998. "Menuju keamanan pangan: krisis ekonomi bukan krisis pertanian". Yogyakarta: Universitas Janabadra. *Makalah Seminar Nasional Ketahanan Pangan*.
- Penny, DH. dan Masri Singarimbun. 1973. *Population and poverty in rural Java: some economic arithmetic from Sriharjo*. Ithaca: Cornell University Press.
- Singarimbun, Masri. 1996. "Peluang kerja dan kemiskinan di Miri, Sriharjo", dalam *Penduduk dan perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.